



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AWAN HERMAWAN PURWADINATA**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENGELOLAAN PRASARANA**
3. NHK : **97563**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/150 m2 di BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/64 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/196 m2 di BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 519 m2/180 m2 di BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/195.2 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.579.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER COUNTRYMAN F60 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY 114/FLFBS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 759.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 90.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.035.959.374



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.243.959.374
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.243.959.374

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.